

PEMBACAAN AL-QUR'AN DI RUANG PUBLIK : REFLEKSI PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS SISWA DITENGAH KEPANIKAN MORAL

Oleh
Tri Wahyuni
(Pascasarjana UIN SUKA-Yogyakarta)
E-mail : triewahyuni46@gmail.com

Abstrak

Kewajiban pembacaan Al-Qur'an disekolah merupakan salah satu refleksi kebijakan pemerintah melalui UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada intinya undang-undang tersebut mendukung bahwa peserta didik harus memiliki perilaku yang baik atau unggul di dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Ihwal tersebut mendasari sekolah-sekolah Negeri untuk mengembangkan wacana pendidikan karakter sebagai upaya preventif dan juga sebagai reskonstruksi moral remaja (siswa) ditengah terpaan kepanikan moral. Melalui obeservasi dan studi dokumentasi melalui sekolah-sekolah dengan kegiatan serupa menegaskan bahwa fenomena kepanikan moral (*moral panics*) menjadi permasalahan dasar terhadap perkembangan pemuda Inc 80 a dimasa depan. Untuk itu perlu adanya dasar atau panutan untuk membentuk generasi Indonesia yang bermoral baik, agar dapat menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur. Tulisan ini memberikan gambaran bahwa kehadiran agama yang diimplementasikan di publik sekolah bukan sebagai bentuk privatisasi, atau eksklusifis terhadap ideologi tertentu. Lebih lanjut, kegiatan pembacaan Al-Qur'an dan kegiatan spiritual lainnya hanya sebagai tolak ukur atau metode untuk membangun kerakter remaja yang baik. Tolak ukur dengan menghadirkan penanaman nilai-nilai agama disekolah dinilai sebagai metode yang tepat digunakan untuk membentuk perilaku yang baik pada remaja, dikarenakan tidak adaya standar kebaikan lain yang dianggap lebih aplikatif dan sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Key word : kepanikan moral, pembentukan karakter, kegiatan spiritual , ruang publik sekolah

Abstract

The order of reading the Qur'an at school is one reflection of government policy through Law No. 20 of 2003 concerning National Education System. In essence, the law supports that students must have good or superior behavior in schools and in society. This is the basis of the state schools to develop character education discourse as a preventive effort and also as a moral reconstruction of adolescents (students) in the midst of moral panic. Through observation and documentation study through schools with similar activities confirms that the phenomenon of moral panics becomes a basic problem for the development of Indonesian youth in the future. For this reason, there is a need for a foundation or

role model to form a generation of good morals in order to be a successor to a quality and noble character. This paper illustrates that the presence of religion implemented in the public school is not as a form of privatization, or exclusive to certain ideologies. Furthermore, Al-Qur'an reading activities and other spiritual activities are only as benchmarks or methods for building good teen character. Measurements by presenting the planting of religious values in schools are considered as the right method used to shape good behavior in adolescents, because there is no other good standard that is considered more applicable and in accordance with Indonesian society.

Key word: moral panic, character formation, spiritual activities, school public space

PENDAHULUAN

Penggunaan simbol-simbol keagamaan diruang publik dianggap sebagai bentuk deprivatisasi agama atau masukan agama dalam ruang publik (privatisasi ruang publik). Wacana ini dimulai sejak masa Orde Baru yang sangat ketat terhadap peran agama dalam ruang publik, karena pada saat itu pemerintah sangat tidak menghendaki dominasi ideologi tertentu di Negara Indonesia yang ia pimpin. Seperti halnya sekolah sebagai wahana publik, sekolah negeri khususnya merupakan sebuah indikasi ruang yang di klaim tanpa adanya dominasi ideologi manapun. Setiap ruang publik adalah wadah penerapan pancasila yang tunggal, hal tersebut artinya eksistensi agama dianggap dapat mengancam pancasila sehingga penggunaan simbol-simbol atau kegiatan keagamaan khusus yang dominan ditengah ruang publik dikhawatirkan dapat memicu dinamika sosial baru seperti “kecemburuan sosial”, baik dalam agama, etnis, ras, dll. Kecemburuan sosial dapat memicu intoleransi akibat adanya eksklusifitas kelompok tertentu yang berujung konflik, dan pada akhirnya konflik akan berdampak pada proses pembangunan yang melambat.

Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru pada masanya sempat memberikan kebijakan yang cukup ekstrem dengan mengeluarkan larangan siswa disekolah negeri menggunakan jilbab atau kerudung. Ihwal tersebut diperkuat dengan mengeluarkan kebijakan pada 17 Maret 1982, melalui Dirjen Pendidikan dan Menengah (Dikdasmen) Prof. Darji Darmodiharjo, SH., dengan mengeluarkan

Surat Keputusan 052/C/Kep/D.82 tentang seragam Sekolah Nasional yang secara intrinsik mensyaratkan pada pelarangan jilbab di sekolah umum negeri.¹ Fenomena lain muncul memasuki dekade reformasi, kebebasan mengekspresikan diri baik dalam hal keagamaan seperti penggunaan jilbab atau simbol-simbol keagamaan lainnya dalam ruang publik sudah tidak lagi dibatasi, bahkan jilbab menjadi gambaran umum masyarakat muslim di Indonesia dan dalam perkembangannya jilbab saat ini justru menjadi simbol komodifikasi agama. Ditambah lagi pasca reformasi yang ditampilkan dengan pertumbuhan masyarakat menengah urban mendukung upaya tersebut, seperti agama yang dapat bersatu dalam upaya-upaya pembangunan sosial, maupun ekonomi. Yang ditampilkan dalam hadirnya nilai-nilai agama dalam ruang publik seperti korporasi dsb.²

Sejatinya, pergeseran wacana baru dari pelarangan penggunaan simbol agama diruang publik dimasa Orde Baru sebagai kekhawatiran eksistensi ideologi tertentu yang akan mengancam otoritas yang ada, dizaman ini telah bergeser namun masih dalam isu yang sama bahwa penggunaan simbol agama diruang publik dianggap sebagai sesuatu yang intoleran hingga dominasi ideologi tertentu dalam ruang publik, yang seharusnya dinilai lebih demokratis dan tidak mendominasi. Dikalangan masyarakat umum ini justru adanya ambiguitas. Yang pertama, kehadiran agama dan berbagai simbol yang mengiringi dianggap ekstrem atau tidak demokratis. Yang kedua, disisi lain masyarakat membawa agama sebagai nilai-nilai atau norma yang tetap digunakan untuk mengukur standar kebaikan perilaku masyarakat. Namun, dalam banyak hal kehadiran agama yang dominan dalam ruang publik mengundang diskursus yang tidak pernah selesai dari masa-kemasa. Pemerintah dahulu (Orde baru) yang mulanya kontra kemudian menjadi Pro, disisi lain saat ini dengan gambaran negara yang demokratis kehadiran agama diruang publik masih saja menjadi debat kusir, hingga otoritas yang mengeluarkan berbagai kebijakapun nampak pro maupun kontra terhadap

¹ Hendi Jo, "Jilbab terkarang di Era Orde Baru ", *Historia : Masa Lampau Selalu Aktual*, diakses dari <https://historia.id/agama/articles/jilbab-terlarang-di-era-orde-baru-6k4Xn> pada 30 Oktober 2018 pukul 12.01 WIB.

² Daromir Rudnycky, *Market Islam in Indonesia*, *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 15, Islam, Politics, Anthropology (2009), pp. S183-S201

kehadiran agama diruang publik khususnya penggunaan simbol-simbol agama. Dalam tulisan ini penulis hanya akan lebih dalam mengkaji ruang publik dengan porsi kedua yaitu bagaimana masyarakat membawa agama dalam ruang publik khususnya ruang publik sekolah, apakah upaya tersebut mencirikan masyarakat yang membutuhkan kehadiran agama diruang publik yang demokratis ini ataukah adanya wacana lain yang mendasari upaya tersebut.

Lebih lanjut dalam tulisan ini, pembacaan teks-teks kitab keagamaan seperti Al-Qur'an menjadi gambaran bahwa adanya kepanikan moral yang di indikasikan pada remaja yang memasuki dunia pubertas dan juga peralihan sosial yang tinggi seperti dampak perkembangan teknologi, media, *game*, hingga potret kenalakan remaja lainnya. Studi ini juga membahas bagaimana institusi membaca fenomena kepanikan moral dan menciptakan iklim disekolah yang lebih religius. Walhasil, wacana pembacaan Al-Qur'an di ruang publik sekolah menghadapi dinamika sosial dan agama. Yang pertama dalam perkembangan siswa-siswi di sekolah, dengan pembacaan teks kitab keagamaan dikhawatirkan menimbulkan eksklusifitas pengikut ideologi tertentu khususnya Islam. Kedua, ketika ruang publik dimainkan oleh kelompok yang eksklusif maka keruangan publik dianggap menjadi cacat. Disinilah mengapa tulisan ini hadir, yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan (remaja) siswa disekolah negeri terhadap kegiatan spiritual yang dilaksanakan seperti pembacaan kitab suci (Al-Qur'an) pada pra pembelajaran. Ketiga, melalui instansi sekolah sebagai ruang publik otoritas sekolah secara reflektif menganggap menggiatkan kegiatan spiritual seperti mengaji, melakukan solat duha, dan kegiatan spiritual lain sebagai solusi yang tepat untuk membentuk karakter yang baik pada siswa. Namun lagi-lagi ketiga wacana diatas menimbulkan pertanyaan balik yang harus dilakukan pengkajian mengenai bagaimana respon otoritas (sekolah-sekolah negeri) terhadap kegiatan rutin yang dilakukan apakah kebijakan yang sengaja diciptakan kuasa (kebijakan sekolah) ataukah ada elit kuasa (pemerintah) yang memberikan arahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tulisan merupakan jenis tulisan deskriptif dimana penulis menggunakan kajian literatur, dokumentasi, dan wawancara tidak langsung dalam proses pengumpulan datanya. Upaya kajian literatur digunakan dengan mengumpulkan data-data literatur yang telah ada, baik melalui penelitian terdahulu, hasil *report* yang kemudian dilakukan analisis deskriptis dan penarikan kesimpulan. Dalam tulisan ini data-data hasil observasi literatur yang dimaksud adalah informasi atau berita mengenai kegiatan pembacaan Al-qur'an disekolah atau artikel-artikel lain yang dapat mendukung analisis dalam penyusunan tulisan. Beberapa data yang diperoleh oleh penulis yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian (tesis dan skripsi), hasil laporan, dan berita-berita yang membuat tentang wacana agama diruang publik khususnya dalam pembacaan Al-Qur'an disekolah. Selain itu, wawancara dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial WhatsApp, hal tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu sehingga untuk mempercepat proses pengumpulan data dan juga informan lebih tanggap jika melalui cara tidak langsung tersebut.

A. Spiritualitas Sebagai Solusi Kepanikan Moral (*Moral Panics*)

Kehadiran agama diruang publik khususnya ruang publik sekolah bukan serta merta hadir begitu saja, melainkan terdapat faktor yang menjadikan mengapa wacana tersebut muncul. Salah satu faktor tersebut adalah fenomena perilaku masyarakat khususnya remaja yang semakin keluar dari tujuan negara, yaitu membentuk masyarakat (rakyat) yang cerdas dan sejahtera.³ Untuk mencapai tujuan negara kekuatan pemuda sangat dibutuhkan pemuda yang cerdas, tanggap terhadap lingkungan, dan memiliki cita-cita yang tinggi untuk kemajuan bangsa, namun hal tersebut sulit untuk dicapai pasalnya degradasi moral yang semakin lama semakin parah. Ihwal tersebut sebagai dampak negatif yang tidak dapat

³ Tujuan Negara tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945, Alinea ke-4

ditanggulangi sendiri oleh masyarakat melainkan perlu sinergi yang besar antara masyarakat dan pemerintah. Kepanikan moral semakin kencang mana kala semakin terbuka lebarnya gerbang kebebasan, salah satunya melalui pasar bebas yang mendukung masifnya produk-produk luar. Fenomena inilah yang saat ini lebih dikenal sebagai *Moral Panics*, kekhawatiran yang luar biasa oleh masyarakat terhadap perkembangan dunia seperti modernisasi dan globalisasi disegala aspek kehidupan yang memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama pada penggunaan gadget, media sosial, hingga pergaulan bebas.

Konsep kepanikan moral "*Moral Panics*" pada mulanya sebagai sebuah bentuk reaksi sosial, reaksi yang terjadi dalam masyarakat yang sangat erat kaitannya terhadap perilaku solidaritas sosial. Konsep *Moral Panics* yang diutarakan oleh para ahli seperti Edwin M. Lemert (1951) yang mengkaji tentang pendekatan reaksi sosial, pendekatan tersebut digambarkan sebagai media pendekatan untuk menganalisis perilaku yang menyimpang, sehingga kemudian Lemert memberikan konsepsi reaksi sosial sebagai julukan atas *moral panic* atau kepanikan moral.⁴ Kepanikan moral akibat reaksi sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Reaksi sosial yang pada akhirnya menimbulkan penilaian (respon) baik atau buruknya perilaku seseorang. Kadang kala reaksi sosial yang berlebihan dalam menanggapi suatu kejadian yang dialami individu atau kelompok tertentu sangat dekat kaitannya dengan toleransi atau tidak toleransi dalam masyarakat. Goode dan Been Yehuda (1994) menyebutkan bahwa bagaimana reaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai perilaku yang sangat penting hubungannya dengan solidaritas.⁵

Sejatinya kepanikan moral telah ada sejak dahulu, salah satu akibatnya adalah degradasi moral yang khususnya terjadi pada remaja yang merupakan tunas-tunas penggerak bangsa. Degradasi moral muncul sebagai akibat perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan

⁴ Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini H., "Teori Penjulukan". *Mediator*, Vol.6.No.2.Desember 2005.298.

⁵ *Ibid*, 298

atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti: minum-minuman keras, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran antara pelajar, hingga sikap tidak lagi menghormati orang tua. Dalam perkembangannya, fenomena kepanikan moral merupakan fenomena yang selalu ada dalam setiap generasi. Kepanikan moral merupakan isu yang menghantarkan pada penurunan kualitas perilaku masyarakat khususnya digambarkan pada penurunan perilaku pada remaja, karena remaja merupakan usia yang sangat rentan dalam menerima pengaruh-pengaruh luar yang negatif, tidak stabil emosinya, sehingga remaja cenderung melakukan segala hal untuk mencari jadi dirinya walaupun sebenarnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar.

Pada dekade 80-an misalnya, bagi sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat desa kegiatan *drum band* merupakan kegiatan yang dianggap menyimpang, hal tersebut dikarenakan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat pada masa itu memandang kegiatan tersebut identik dengan wahana kenakalan remaja. Walhasil penjulukan bahwa *drum band* era itu dikategorikan sebagai contoh pelaku menyimpang atau tidak pantas menurut pandangan masyarakat pada saat itu. Lebih dalam menelusuri perkembangan fenomena kepanikan moral tersebut pada dekade 90-an atau dikenal dengan generasi-x atau milenial, fenomena *drum band* bukan lagi merupakan hal yang tabu bagi masyarakat. Lebih lanjut wacana degradasi moral bergeser pada pengaruh masuknya budaya pop-barat seperti banyaknya novel-novelt, film, musik dan perkembangan teknologi (gadget) maupun lainnya dianggap mengundang perilaku menyimpang seperti maraknya pornografi, seks diluar nikah, obat-obatan terlarang dan sebagainya.

Dalam era baru, dekade 2000-an atau lebih dikenal dengan generasi-z misalnya maka wacana degradasi moral tersebut bergeser lebih tinggi. Wacana ihwal tersebut bukan hanya sek bebas, dan kenalakan remaja lainnya, akan tetapi pada degradasi moral yang semakin mengancam perilaku remaja dan semakin buruk seperti dampak media sosial. Walhasil, saat ini masyarakat membutuhkan standar kebaikan (kepantasan tertentu untuk menjadikan contoh baik bagi

perkembangan perilaku, misalnya saja seperti pada kalangan masyarakat menengah perkotaan dimana dimana norma adat maupun sosial cenderung terabaikan bahkan luntur dan pada akhirnya masyarakat akan mencari standar kebaikan tertentu yang lebih dianggap lebih sesuai dengan dirinya yang baru sebagai contoh dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Oleh karena itu agama dianggap yang paling tepat sebagai upaya preventif maupun upaya rekonstruksi moral masyarakat terhadap fenomena *moral panics* yang semakin berkembang. Kehadiran agama yang menjadi nilai identitas kebaikan moral yang dimiliki seseorang tercermin bila individu tersebut melakukan amalan-amalan (spiritual) rutin yang dilakukan, misalnya saja orang yang disebut soleh dalam agama Islam sering diidentifikasi dengan orang yang rajin solat di masjid, rajin mengaji Al-Qur'an, rajin mengikuti pengajian, berbusana sesuai syariat dll. Ihwal tersebut tergambar sebagai reaksi masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, meskipun terkadang identifikasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan label yang diberikan masyarakat kepada individu tersebut. Lebih lanjut, dalam upaya mencegah dan mengatasi problem kepanikan moral ini masyarakat menarik nilai-nilai spiritual yang kemudian diterapkan dalam ruang publik sekolah sebagai tujuan untuk memberikan panduan sekaligus alat bagi siswa untuk memiliki perilaku yang baik sesuai nilai-nilai agama tersebut.

B. Refleksi Pemerintah Terhadap Kepanikan Moral di Indonesia

Kepanikan moral yang berkembang dengan cepat dalam masyarakat Indonesia khususnya generasi remaja membuahkan pekerjaan rumah bagi otoritas dalam hal ini pemerintah, maupun keluarga yang mendambakan seorang anak memiliki budi pekerti yang luhur. UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan kurikulum 2006 yang didalamnya memuat tentang pengembangan diri dan latihan

pembiasaan merupakan usaha pemerintah memaksimalkan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moral anak didik serta menciptakan perilaku yang baik. Melalui kebijakan tersebut pemerintah memberikan wewenang kepada otoritas sekolah untuk mengembangkan program-program yang menunjang pencapaian tujuan pemerintah melalui kebijakan tersebut.⁶ Implikasi dari keluarnya kebijakan tersebut adalah pengembangan pendidikan karakter siswa untuk membentuk siswa yang berbudi pekerti yang luhur. Nilai-nilai karakter penting diwujudkan dalam penerapan program pembiasaan. Nilai-nilai ini-lah yang nantinya menjadi output atas segala pelaksanaan pembelajaran dan budaya sekolah. Nilai-nilai tersebut, meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik untuk Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka membangun karakter bangsa adalah melalui penguatan budaya bangsa, aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, implemementasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, keteladanan dari semua komponen bangsa, dan melalui pendidikan baik formal, informal, maupun non formal.

Selain itu, Kebijakan pendidikan karakter tersirat dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disebutkan bahwa substansi inti program aksi bidang pendidikan diantaranya adalah penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi mengarah pada kelulusan (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia dengan memasukkan pula pendidikan kewirausahaan sehingga sekolah dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia.⁷ Dikeluarkannya kebijakan pemerintah baik melalui Undang-undang maupun peraturan lainnya

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses melalui kelembagaan.ristekdikti.go.id

⁷ Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/site/file>

menandakan bahwa pemerintah ikut berperan aktif dan merespon adanya fenomena *moral panics* yang mengancam masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya menjadikan kekuatan bagi otoritas sekolah untuk mengembangkan program-program yang bertujuan untuk membentuk perilaku siswa yang berkarakter luhur, karena kecerdasan kognitif saja tidak cukup untuk membentuk generasi yang mumpuni namun juga kecerdasan spiritual dan emosional seperti memiliki budi pekerti yang luhur menjadikan identitas bangsa semakin baik, karena memiliki generasi muda yang baik.

Beberapa program atau kegiatan yang pada akhirnya direfleksikan oleh sekolah dengan berdasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut seperti kewajiban menggunakan rok panjang di setiap sekolah, hingga kebijakan sekolah yang menghimbau penggunaan jilbab atau kerudung banyak terjadi di sekolah-sekolah khususnya sekolah negeri. Peristiwa tersebut dianggap sebagai refleksi atas kepanikan moral yang berujung pada degradasi moral, upaya otoritas sekolah dalam berbagai himbauan yang terkesan mendominasi simbol ideologi tertentu tentunya mendatangkan banyak tanggapan dikalangan umum, baik pemerintah maupun masyarakat. Misalnya saja maraknya wacana politisasi islam (islamisasi), penguasaan islam terhadap ruang publik, hingga radikalisme di sekolah. Akan tetapi dalam ihwal ini sejatinya pembacaan Al-Qur'an di sekolah bukan merupakan isu yang terkait islamisasi atau hal lainnya yang dinilai menonjolkan ideologi tertentu, melainkan nilai-nilai spiritual dianggap lebih tepat untuk mengantisipasi dan merekonstruksi moral siswa karena standar kebaikan atau individu baik masih berada dalam tatanan atau pandangan nilai agama.

Bagi orang tua, selaku otoritas terkecil dalam masyarakat pastinya memiliki kekhawatiran yang luar biasa (*moral panics*) ketika anak mereka berada dalam zaman yang semakin berkembang dengan berbagai dampak negatif yang muncul. Untuk itu khususnya para orang tua akan lebih memilih anak-anak mereka untuk bersekolah di lingkungan yang lebih agamis, atau mengedepankan

nilai-nilai spiritual yang tinggi. Meskipun orang tua sejatinya tidak agamis mereka cenderung mendukung anak mereka menggunakan pakaian tertutup, bahkan menggunakan jilbab. Ihwal tersebut disebabkan pada reaksi masyarakat terhadap standar pakaian yang tepat dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia dinilai dengan pakaian-pakaian yang tertutup seperti celana/rok panjang, baju panjang. Lebih lanjut hal tersebut mengindikasikan bahwa pembacaan Al-Qur'an di sekolah, khususnya sekolah negeri bukan menjadi isu privatisasi atau mengunggulkan ideologi tertentu tetapi hanya karena aturan yang dianggap baik dalam masyarakat pada saat ini misalnya dalam berpakaian mendekati ciri-ciri berpakaian ideologi tertentu seperti baju kurung rok panjang, jilbab yang identik dengan Islam. Sementara itu, yang menjadi permasalahan sejatinya bukan muslim atau Islamnya yang memaksakan diri masuk dalam sistem dan ruang yang publik, akan tetapi karena negara tidak memiliki standar perilaku yang sudah paten atau tepat, yang telah disusun, diatur sedemikian rupa oleh negara. Misalnya tentang aturan atau standar nilai "baik" dari segi berpakaian yang dianggap baik.

Jadi melalui fenomena tersebut sejatinya tidak ada tujuan dalam ruang publik untuk mendominasi ideologi tertentu, namun karena kebutuhan perwujudan perilaku atau kehidupan yang dianggap baik adalah nilai-nilai agama yang dapat merefleksikan pada budi pekerti yang baik. Dalam kajian lain hal tersebut dikenal dengan *need for religious identity*, diidentikan pertumbuhan kelas menengah yang berupaya mencari identitas baru dalam sosial, ekonomi, maupun politik. Identitas yang dianggap tepat bagi masyarakat menengah itu adalah identitas agama dengan nilai-nilai spiritual yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap diri individu ditengah kepanikan moral yang berlangsung. Ihwal tersebut dapat menjawab mengapa masyarakat cenderung menyekolahkan anak-anak mereka dalam lingkungan sekolah yang menanamkan nilai spiritual nyatanya sebagai bentuk pencarian identitas mereka.⁸

⁸ Daromir Rudnycky, *Market Islam in Indonesia*, The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, Islam, Politics, Anthropology (2009), pp. S183-S201

C. Berkembangnya Agama sebagai Identitas Spiritual Masyarakat di Ruang Publik Sekolah

Transisi budaya remaja mulai dari imitasi budaya Pop-modern yang ke-Barat-baratan hingga munculnya budaya K-Pop yang ke-Timur-an memberikan kebutuhan identitas agama atau ideologi yang akan digunakan sebagai benteng transisi budaya dan perilaku remaja. Ditengah kepanikan moral yang melanda wacana spiritual (keagamaan) di ruang publik seperti tumbuh suburnya sekolah-sekolah swasta berbasis ideologi tertentu yang menawarkan berbagai macam kegiatan ekstra maupun intra sekolah yang dianggap mampu membentengi siswa ditengah *moral panics* dan juga sebagai ajang pencarian identitas keagamaan bagi siswa dan orang tua. Pada akhirnya hal ini dapat mempengaruhi preferensi otoritas keluarga (orang tua) dalam memilih pendidikan bagi sang anak, dimana mereka lebih memilih untuk memasukan anak-anak mereka untuk belajar pada sekolah yang memiliki dasar keagamaan yang tinggi seperti Sekolah Islam Terpadu, *Boarding School*, maupun basis sekolah yang berkembang sangat baik di Indonesia seperti sekolah berbasis spiritual misalnya kriter memiliki afiliasi sekolah Kanisius, dan muslim yang lekat dengan Sekolah Muhammadiyah maupun Sekolah Ma'arif.

Data yang dimuat oleh Dinas Pendidikan DIY tercatat bahwa jumlah pertumbuhan sekolah negeri dan sekolah swasta berbasis agama tumbuh hampir setara, bahkan pertumbuhan sekolah swasta berbasis Islam digadang akan tumbuh lebih tinggi dibanding sekolah negeri. Misalnya saja, untuk jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri di DIY tercatat dari tahun 2014 sebesar 219 unit SMPN yang dinyatakan layak, hingga tahun 2018 jumlahnya menurun menjadi hanya 214 Unit sekolah. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta di DIY dimana pada tahun 2014

sebanyak 218 sekolah hingga tahun 2018 terus mengalami kenaikan mencapai angka 221 unit sekolah.⁹

D. Kewajiban Pembacaan Al-Qur'an di Sekolah sebagai Pembentukan Karakter Religius

Munculnya program atau kegiatan keagamaan di sekolah seperti pembacaan kitab suci Al-Qur'an pada waktu pra-pembelajaran di kegiatan intra sekolah maupun ekstra sekolah seperti program tahfid (hafalan Al-Qur'an) menjadi metode yang dianggap tepat untuk meningkatkan moral siswa menuju moral yang baik, hal tersebut diwujudkan dengan budipekerti yang santun, menghormati guru (orang tua), dll. Seperti dalam deskripsi pada bab-bab sebelumnya, misalkan saja suatu keluarga yang tidak religius tidak pernah menggunakan jilbab, tidak pernah membaca Al-Qur'an atau dalam artian keluarga yang tidak agamis akan tetapi mereka tidak ingin melihat anaknya menggunakan pakaian-pakaian yang seksi apalagi disekolah, ditambah lagi pergaulan yang semakin bebas kadang kala menyulitkan orang tua dalam hal pengawasan terhadap anak. Ihwal tersebut mendorong orang tua untuk menyelaraskan program-program sekolah yang bertujuan untuk menanamkan karakter religius bagi siswa dengan upaya mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan mengaji disekolah hingga mengikuti ekstra kulikuler seperti tahfidz.

Program pembacaan Al-Qur'an disekolah ini semakin berkembang dan banyak diaplikasikan diberbagai sekolah-sekolah di Indonesia terutama sekolah negeri. Seperti diberberapa sekolah menengah pertama negeri di Yogyakarta yang tergolong kepada sekolah negeri favorit turut mewarnai penggunaan praktik-praktik keagamaan sebagai upaya penanaman karakter siswa yang baik. Beberapa sumber yang menjadi hasil penelusuran dan analisis terkait dengan fenomena ini seperti kewajiban pembacaan kitab suci Al-Qur'an sebelum memulai jam pembelajaran pertama disekolah. Beberapa dari siswa disekolah-sekolah SMPN

⁹ Master Data Pendidikan DIY, "Jumlah Sekolah", diakses dari www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=data-pendidikan, pada tanggal 4 november 20018 pukul 16.07 WIB.

favorit di kota Yogyakarta mengaku adanya rutinitas yang menjadi kewajiban siswa untuk mengikuti kegiatan mengaji (tadarus Al-Qur'an) pra-pembelajaran. Biasanya kegiatan membaca Al-Qur'an dialkaskan selama 5-10 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.¹⁰

Hampir sebagian besar sekolah negeri khususnya SMPN di Yogyakarta turut mewarnai wacana kewajiban mengaji disekolah. Adapun beberapa sekolah yang di indikasi melakukan kegiatan membaca Al-Qur'an secara rutin pada pra-pembelajaran di sekolah seperti: SMPN 08 Yogyakarta, SMPN 02 Yogyakarta, SMPN 05 Yogyakarta, SMPN 16 Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Sekolah-sekolah tersebut disebut sebagai sekolah negeri yang telah membawa ideologi tertentu khususnya Islam untuk hadir secara terbuka di ruang publik sekolah. Jika kita menilik pada sampel sekolah yang disebutkan diatas bahwa sebagian besar sekolah tersebut merupakan sekolah favorit yang notabenehnya siswa yang ada berasal dari berbagai etnis, agama, dan suku yang berbeda. Dalam hal ini pengangkatan simbol keagamaan dalam kegiatan membaca Al-Qur'an dapat disebut sebagai langkah serentak oleh sekolah-sekolah dikarenakan wacana moral panik yang semakin merebak.

Wacana tersebut juga muncul diberbagai daerah lain di Indonesia seperti di SMP Muhammadiyah Bungah, Gresik. Dalam upaya sekolah merespon wacana kepanikan moral dan juga didukung melalui kebijakan pemerintah tentang pembentukan karakter yang baik bagi siswa tersebut, otoritas sekolah SD Muhammadiyah Bungah mereflesikan dalam bentuk upaya penanaman karakter yang luhur melalui metode membaca Al-qur'an secara wajib. Ihwal tersebut dilaksanakan setiap hari (rutin) minimal 10 menit. Lebih serius kepala sekolah SD Muhamadyah Bungah tersebut kemudian di sahkan melalui SK kepala sekolah yaitu SK 17 juli 2010 No.010/Kep/ IV.4/a/ 2010 untuk mengembangkan

¹⁰ Data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara tidak langsung yaitu melalui media sosial seperti *whatsapp* untuk menggali informasi dari narasumber yang merupakan siswa di beberapa SMP Negeridi Yogyakarta

pendidikan karakter di sekolah.¹¹ Selain itu di SD Negeri 1 Nologaten, Ponorogo upaya pembangunan karakter siswa yang religius dilakukan dengan kegiatan pembacaan surat-surat pendek disekolah. Hal tersebut oleh pihak sekolah dinilai sebagai upaya yang tepat untuk menanamkan karakter religius siswa, kepala sekolah SDN 1 Nologaten mengungkapkan bahwa:

*“Latar belakang diadakan pembiasaan membaca surat-surat pendek di SDN 1 Nologaten itu karena melemahnya karakter siswa. Melemahnya karakter siswa tecermin dari perilaku siswa seperti berkata kotor dan kurang sopan santun”.*¹²

Lebih lanjut Kepala sekolah mengungkapkan bahwa :

*“Tujuan diadakan kegiatan tersebut untuk menanamkan karakter pada siswa. Terutama karakter religius siswa. Hasil akhirnya diharapkan siswa mempunyai tata krama yang sesuai dengan norma agama yang terkandung dalam surat-surat pendek yang telah dibaca”.*¹³

SMP N 1 Dagangan, Madiun turut merefleksikan kegiatan pembacaan Al-Qur’an di sekolah, namun dalam upaya Implementasi sekolah ini lebih mengarahkan kepada kegiatan ekstrakurikuler bimbingan baca al-qur’an BBQ dan tahfids Qur’an dalam menumbuhkan akhlak mulia dalam diri peserta didik. Dalam kegiatan tersebut upaya yang dilakukan sekolah masih dalam wadah dan dukungan pemerintah tentang diperbolehkannya andil agama dalam ruang sekolah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar proses pendidikan Agama Islam (PAI). Lebih lanjut hal

¹¹ Faridatul Mardlotillah, *Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Program Pembiasaan Membaca Al-Qur’an*, Jurnal kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Juli 2010, 150-155

¹²Yusfa Arifatul Qoyimah, *Pembiasaan Membaca Surat-Surat Pendek Dalam Penanaman Karakter Religius Siswa (Studi Kasus Di Sdn 1 Nologaten Ponorogo)*,64

¹³ Ibid, 65.

tersebut dijelaskan bahwa program ekstra kulikuler PAI adalah proses pembelajaran yang mendukung pembelajaran intrakulikuler dalam upaya memantapkan dan pengayaan dalam penguasaan AL-Qur'an, pengamalan ibadah, keimanan, dan ketakwaan, akhlak mulia, nilai-nilai sejarah, seni, dan kebudayaan, yang dilakukan diluar jam tatap muka terstruktur, melalui bimbingan guru PAI, Guru mata pelajaran lain dan tenaga kependidikan lainnya.¹⁴

Merambah keluar pulau Jawa, sekolah di Sumatra, Kalimantan seperti SD Negeri 109 di Palembang turut menerapkan pembinaan akhlakul karimah pada siswa melalui pembiasaan membaca al-qur'an sebelum proses belajar dilakukan. Hampir sama dengan latarbelakang yangtelah diungkapkan oleh otoritas seolah lainnya. Menurut ibu Latifah selaku kepala sekolah SDN 109 Palembang (dalam Wulandari,2006)

*“ Di SD N 109 Palembang ini siswa – siswi memang sengaja dibentuk dan diina akhlaknya agar menjadi baik, setiap harinya siswa-siswi dibiasakan untuk datang elbih awal ke sekolah yakni pukul 6:30 sudah harus berada disekolah dan pinti gerbang ditutup pukul 6:40, setelah itu mereka melakukan kegiatan baris berbaris didepan kelas masing-masing, membaca al_qur'an, mendengarkan tausiah keislaman tentang ayat AL-Qur'an yang dibacanya dan berdoa sebelum belajar”.*¹⁵

SMA Vidatra, Bontang yang merupakan sekolah swasta dibawah yayasn Pertamina ini mengikuti wacana keapanikan moral dengan upaya yang sama yaitu dnegan menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan di sekolah. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an sebelum dimualinya jam belajar pagi hari. Jika kita Menelusuri berbagai sekolah di daerah-daerah di Indonesia yang turut mengembangkan kegiatan pembacaan Al-Qur'an disekolah, hal ini menjelaskan

¹⁴ Keputusan menteri Agama no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar Nasional PAI di Sekolah

¹⁵ Merupakan hasil wawancara langsung oleh peneliti terdahulu yaitu Sri Wulandari, yang merupakan mahaiswa di UIN Raden Patah Palembang, 2006.

bahwa agama di ruang publik dengan menggunakan nilai spiritual membaca Al-Qur'an merupakan sebuah tolak ukur untuk menciptakan karakter yang baik pada siswa bukan sebagai wacana yang membawa pada eksklusifitas ideologi tertentu. Pada intinya, harapan dengan adanya kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan yaitu bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi disatu sisi juga memiliki budi pekerti, dan perilaku yang luhur. Nilai-nilai spiritual yang ada dan diterapkan disekolah melalui pembacaan Al-qur'an bagi siswa muslim merupakan langkah yang tepat, karena standar kebaikan perilaku individu dalam negara cenderung lebih mengarah kepada nilai-nilai keagamaan, oleh karena itu sebagai upaya melawan kepanikan moral yang semakin melanda masyarakat khususnya kelas menengah terlepas dari segala diskursus lain yang melatarbelakangi dianggap berhasil mengurangi dampak degradasi moral yang melanda remaja khususnya siswa-siswi disekolah.

PENUTUP

Konsepsi *moral panics* yang menyerang masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat kelas menengah yang sangat khawatir terhadap situasi anak-anak mereka menghendaki suatu identitas yang lebih mampu memberikan perlindungan. Fenomena tersebut kemudian ditangkap oleh otoritas (pemerintah dan sekolah) dengan berupaya melakukan kegiatan preventif maupun rekonstruksi moral siswa untuk menjadikan siswa-siswi menjadi remaja yang berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur.

Pada tulisan ini pembacaan teks Al-Qur'an : mengaji, tadarus, *tahfidz* (hafalan Al-Qur'an) diruang sekolah khususnya sekolah Negeri bukan lagi menjadi isu ruang publik yang terprivatisasi karena adanya kehadiran agama yang dominan. Lebih dalam upaya tersebut sebagai suatu tindakan rekonstruksi moral sebagaimana upaya sekolah sebagai otoritas pemerintah dan orang tua sebagai masyarakat dalam melakukan kegiatan preventif terhadap kemungkinan kenalakan

remaja akibat kepanikan moral yang melanda kian agresif dalam perkembangan dunia global yang semakin modern. Walhasil, kegiatan preventif ini mengangkat nilai agama sebagai nilai yang tepat sebagai tolak ukur perbaikan dan penangkal tabiat buruk remaja. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada dominasi ideologi tertentu yang mencoba menguasai peradaban melalui gerakan khusus dalam ruang publik sekolah, melainkan nilai ideologi tertentu seperti ideologi Islam yang hanya digunakan sebagai metode yang lebih tepat digunakan dalam menjadikan *benchmark* perilaku yang baik bagi individu dalam masyarakat, khususnya perilaku remaja.

Selain itu, tidak adanya *benchmark* yang dianggap lebih tepat yang dapat digunakan atau menjadi tolak ukur dalam mencegah atau membangun nilai baik itu, maka kebanyakan sekolah mengangkat spiritual Islam seperti membaca Al-Quran sebelum pelajaran sebagai penguat karakter. Ihwal tersebut secara lebih lebih pesat dengan semakin banyaknya sekola-sekolah baik Negeri maupun swasta yang berbasis spiritual maupun tidak turut menanamkan karakter religus sebagai tameng untuk siswa menghadapi problema sosial yang semakin rumit yang memicu kepanikan moral. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada wacana eksklusifitas ideologi tertentu yang mencoba menguasai ruang publik yang dikhawatirkan akan memicu konflik, akan tetapi upaya tersebut justru sebagai pencegahan konflik yang mungkin muncul.

DAFTAR PUSTAKA

WEB

Master Data Pendidikan DIY,” Jumlah Sekolah”, diakses dari www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=data-pendidikan , pada tanggal 4 november 20018 pukul 16.07 WIB.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/site/file>. (t.thn.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses melalui kelembagaan.ristekdikti.go.id . (t.thn.).

JURNAL

Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini H. (2005). Teori Penjurukan. *Mediator, Vol.6.No.2*.

Edwin M. Lemert (2000), *Crime and Deviance*, California: Rowman & Littlefield Publisher

Goode, and Ben-Yehuda, (1994), *Moral panics: Culture, Politics, and Social Construction, Annual Reviiew of sociology, Vol.20. pp. 149-171*

Keputusan menteri Agama no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar Nasional PAI di Sekolah. (t.thn.).

Nugroho, H. (2012). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Semarang. *IAIN Walisongo*.

Mead, George Herbert. (1934). *Mibd Sef and Society*, ed. C.W, Morris. Chicago: University of Chicago

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 19945, Alinea ke-4. (t.thn.).

Qoyimah, Y. A. (2006). Pembiasaan Membaca Surat-Surat Pendek Dalam Penanaman Karakter Religius Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Nologaten Ponorogo,64 .

Rudnycky, D. (2009). Market Islam in Indonesia. *The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, Islam, Politics, Anthropology*, pp. S183-S201.